



Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (CSF)  
Jl. Mampang Prapatan VI No.67 Jakarta Selatan  
021-7990139  
Email : csforum@cbn.net.id

**Keadilan GENDER DALAM Keadilan IKLIM**



## Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim

### Penyusun

Khalisah Khalid I Siti Maemunah (CSF/JATAM) I Puspita Dewi (Soliper)

### Kontributor

Mida Novawanty Saragih (KIARA) I Elisha Kartini (SPT) I Betty Nababan (DTE) I Ulfa Hidayati (Kapal Perempuan) I Ade Herlina Haris (Soliper) I Ina Nisrina (Sekretariat CSF)

### Desain Grafis

Dodo

### Dokumentasi:

Betty Nababan I Rio I Sofyan "Eyanks" I Ferry Latief I JATAM Kaltim I WALHI I KIARA I Rimbawan Muda Indonesia I Kapal Perempuan I Sarekat Petani Indonesia I PIKUL

Cetakan Pertama, Januari 2011

Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim

Cet. I - Jakarta: CSF, 2011

iv + 36 hal. ; 210 x 140 mm

### Diterbitkan Oleh:

Forum Masyarakat Sipil (CSF)

Jl. Mampang Prapatan VI No.67 Jakarta Selatan

021-7990139

Email : csoforum@cbn.net.id



Januari, 2011

# Daftar Isi

Kata Pengantar



Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim 1



Perempuan dan Jejak Perubahan Iklim 5

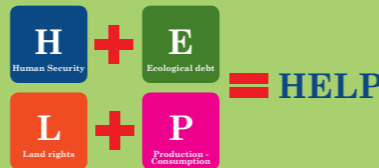


Perempuan Bertahan Hidup 11

ii



Perubahan Iklim, Melanggengkan Ketidakadilan 15



Keadilan Iklim yang Berkeadilan Gender 23



Kertas Posisi : Tak ada Keadilan Iklim tanpa Keadilan Gender 29

# Kata Pengantar

Bacaan Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim ini tak lahir begitu saja.

Ini lahir dari kesadaran anggota kelompok Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Iklim. Kami, terus mendorong prinsip-prinsip Keadilan iklim yang berkeadilan Gender. Sebab kami meyakini, perempuan mengalami ketidakadilan berganda karena dampak dan penanganan perubahan iklim. Oleh karenanya, perubahan iklim tidak bisa dilihat sebagai sebuah proses yang netral gender.

Proses pembuatan bacaan ini butuh waktu panjang, sebelum sampai ke publik. Ada dua kali Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan guna menjangkau masukan. Pertama, pertemuan dengan kelompok Organisasi Non Pemerintah yang mempunyai perhatian terhadap isu lingkungan dan keadilan Gender pada 30 November 2010. Pertemuan tersebut menghasilkan masukan untuk draft awal bacaan ini.

Selanjutnya, draft diperkaya oleh hasil FGD kedua bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada 13 Januari 2011 di kantor KPPPA. Peserta kali ini beragam, ada 27 lembaga, mulai instansi pemerintah, media, organisasi masyarakat,

lembaga donor juga Organisasi Non Pemerintah yang bekerja pada isu-isu yang lebih luas.

Jadi, meskipun diterbitkan oleh CSF, bacaan "Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim" ini lahir dari partisipasi dan kontribusi banyak pihak, beragam latar. Diharapkan bahan ini akan menjadi dokumen hidup, yang bisa dikomentari dilengkapi, atau kelak diperbaharui.

Bacaan ini terdiri dari dua bagian, lembar fakta dan kertas posisi

Terimakasih tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat. Semoga dokumen ini berguna mendorong keadilan iklim yang berkeadilan gender.

Salam Keadilan Iklim

**Koordinator Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim/CSF**

Giorgio Budi Indarto



FAKTA  
01

“Perempuan mengalami ketidakadilan berganda karena penyebab, dampak dan penanganan perubahan iklim.

## Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim

Kehidupan perempuan makin sulit, Seperti yang dialami perempuan nelayan di pesisir Indramayu Jawa Barat Ketika banjir terjadi, tidak pernah ada bantuan yang diberikan oleh negara kepada warga.

Takhanya Indramayu, dalam 10 tahun terakhir, berbagai krisis dan bencana terus terjadi di Indonesia. Sebagian besar disebabkan kegagalan global pembangunan yang menggerus kekayaan alam dan mengabaikan daya dukung lingkungan. Akibatnya, krisis bertambah dalam, termasuk meningkatnya ancaman bencana, seperti kekeringan, banjir, perubahan cuaca ekstrim, gagal panen, meningkatnya hama tanaman, penyakit, datang silih berganti di berbagai wilayah<sup>1</sup>.

Dampak perubahan iklim yang begitu cepat terjadi. Di hadapi warga tanpa Informasi yang mencukupi, kemampuan bertahan hidup yang lemah, khususnya perempuan, serta lemahnya prioritas penanganan oleh negara.

Celaknya, di tengah krisis yang terus menghimpit, ancaman lain justru datang dari sistem dan praktek politik saat ini. Otonomi daerah yang bercita-cita mendekatkan akses dan kontrol rakyat terhadap sumber daya alamnya, justru mempersempit ruang hidup perempuan. Pemerintah Daerah berlomba mengeluarkan kebijakan obral kekayaan alamnya dalam bentuk ijin usaha dan Peraturan Daerah (Perda).



Di Kalimantan Timur saja, hingga 2010, pemerintah mengeluarkan 1212 ijin konsesi tambang.<sup>2</sup> Belum lagi perkebunan besar kelapa sawit. Hingga 2009, dikeluarkan 303 ijin, mencapai luasan 3,65 juta hektar<sup>3</sup>. Semangat mengobral sumber daya alam di daerah, ternyata sejalan dengan Pusat. Departemen Pertanian mengeluarkan izin kepemilikan areal perkebunan kelapa sawit swasta dalam satu kabupaten atau provinsi hingga 100 ribu hektare (ha)<sup>4</sup>.

Perda-Perda tersebut tak hanya membatasi perempuan mengakses dan mengontrol sumber daya alamnya. Juga diskriminatif terhadap perempuan, seperti Perda-Perda Syariat dan kebijakan yang membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah publik, termasuk menjadi pemimpin. Seorang camat perempuan di Bireun Nanggroe Aceh Darussalam terancam diberhentikan karena desakan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang menafsirkan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.<sup>5</sup> Otonomi daerah dan pembangunan demokratisasi yang berjalan saat ini, belum menyentuh agenda keselamatan dan kesejahteraan khususnya perempuan.

Sayangnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai bagian dari pemerintah

yang berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi perempuan dan anak di Indonesia, justru tak memiliki kekuatan politik signifikan untuk campur tangan. Mereka mengakui belum memiliki agenda keselamatan dan kesejahteraan perempuan, khususnya yang terancam dampak perubahan iklim<sup>6</sup>.

Di instansi pemerintah lainnya, isu perubahan iklim dan keadilan gender juga belum secara serius ditangani oleh instansi pemerintah melalui kebijakannya. Banyak kebijakan tidak sinkron. satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya. Padahal perubahan iklim dan keadilan gender sudah menjadi isu besar dan *cross-cutting* isu yang harusnya sudah menjadi perhatian berbagai instansi pemerintah untuk menangani dampak perubahan iklim, berkait dengan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya.<sup>7</sup>

Padaahal, perubahan iklim kini bukan lagi wacana. Ia telah berdampak terhadap hilangnya sumber-sumber kehidupan perempuan, seperti akses terhadap air bersih yang semakin berkurang, akses terhadap lingkungan yang sehat, semakin berkurang akibat pencemaran udara maupun air. Itulah sebabnya, kondisi kegentingan yang dihadapi perempuan akibat dari kegagalan model global pembangunan dan perubahan iklim bukan persoalan biasa saja.

“

Seorang camat perempuan di Bireun Nanggroe Aceh Darussalam terancam diberhentikan karena desakan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang menafsirkan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Otonomi daerah dan pembangunan demokratisasi yang berjalan saat ini, sama sekali tidak berurusan dengan agenda keselamatan dan kesejahteraan khususnya perempuan.





FAKTA  
02

“  
Perubahan iklim tidak bisa dilihat  
sebagai sebuah proses yang netral gender.

## Perempuan & Jejak Perubahan Iklim

Pada 2001, IPCC<sup>8</sup> atau panel ahli tentang perubahan iklim menyebut dampak perubahan iklim berbeda di setiap wilayah, generasi, usia, kelas, pendapatan, pekerjaan dan jenis kelamin. Perempuan mengalami pengalaman yang berbeda dari laki-laki, karena terkait dengan posisi, relasi dan peran gender yang selama ini dilekatkan kepada perempuan.

Artinya, perubahan iklim memberikan dampak lebih berat terhadap perempuan-perempuan dari kelompok sosial atau kelas paling rendah. Mereka memiliki sumberdaya lebih terbatas untuk mempertahankan hidupnya dari berbagai krisis.

Pada setiap bencana, baik karena dampak perubahan iklim atau tidak, ternyata menelan korban perempuan

lebih besar dari pada laki-laki. Ketika hak perempuan tidak dilindungi, maka jumlah korban perempuan akan lebih besar dari pada laki-laki. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang menjunjung persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, jumlah korbannya sama. Karena itulah, perubahan iklim tidak bisa dilihat sebagai sebuah proses yang netral gender<sup>9</sup>.

Thoraya Ahmed Obaid, Direktur Eksekutif UNFPA<sup>10</sup> menyatakan "Perempuan di negara-negara miskin termasuk yang paling terpuak akibat perubahan iklim. Perempuan menanggung beban yang tidak proporsional karena perubahan iklim. Seperti mengatasi masalah mayoritas 1,5 miliar orang di dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$1 per

hari.<sup>11</sup> Sementara 64,23 persen dari 31,02 juta penduduk miskin berada di daerah pedesaan, dan sebagian besar mereka bekerja di sektor Pertanian.<sup>12</sup> Serikat Petani Indonesia menyebut 70-80 persen pekerja di sektor pertanian adalah perempuan.

Meutia Hatta Swasono, saat menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mengatakan, perubahan iklim berdampak lebih parah pada perempuan karena berbagai peran yang kerap kali distereotipkan untuk perempuan di dalam keluarga. Lebih jauh, Meutia Hatta menyatakan "perempuan memikul tanggung jawab utama untuk mengumpulkan air dan bahan bakar serta menyediakan pangan untuk keluarga mereka."<sup>13</sup>

Di Indonesia, bagi perempuan di pedesaan dan yang sangat bergantung hidupnya dari alam, perubahan iklim menyebabkan meningkatnya curah waktu terhadap beban pekerjaan domestik akibat hilangnya sumber air bersih. Ini dialami perempuan di wilayah pesisir Teluk Jakarta yang terkena banjir rob.<sup>14</sup> Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut perempuan yang tinggal di pesisir utara Jakarta melakukan pekerjaan tidak kurang dari 17 jam setiap harinya.<sup>15</sup>



Celakanya, masyarakat pesisir juga menghadapi meningkatnya intensitas banjir rob, juga kegaraman air payau. Bencana rob di desa Ilir kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sudah berlangsung sejak 1984, telah menenggelamkan sawah. Banjir yang setahun sekali datang ini, kini berlipat tiga, bahkan telah masuk ke wilayah permukiman.

Petani perempuan menghadapi kondisi makin sulit. Serikat Petani Indonesia mencatat, pada 2006, total areal pertanian di Indonesia yang terkena dampak banjir mencapai 66,400 hektar. Antara Oktober - Desember 2007 saja, banjir telah menyebabkan 6,676 hektar lahan pertanian gagal panen. Ini kerap terjadi di musim hujan.

Berdasar proyeksi peningkatan kenaikan muka air laut akibat pemanasan global di pulau Jawa, jika terjadi tambahan peningkatan sebesar 0,5 meter, diproyeksikan sebanyak 113 ribu hektar sawah akan hilang. Jika naik sebesar satu meter, sebanyak 146,5 ribu hektar sawah di pulau Jawa akan tenggelam.<sup>16</sup> Kondisi tersebut akan mempengaruhi penurunan hasil pertanian atau produksi pangan padi antara 20-27 persen, jagung 13 persen, kedelai 12 persen dan tebu sekitar 7 persen pada 2050.

Sementara pada kemarau, suhu menjadi terlalu panas. Kekeringan menyebabkan petani di desa Ilir Indramayu bisa panen hanya satu kali setahun. Ini berlangsung sejak enam tahun lalu. Hanya 3 ton setiap

" Perempuan memikul tanggung jawab utama untuk mengumpulkan air dan bahan bakar serta menyediakan pangan untuk keluarga mereka " \_\_\_\_\_ Meutia Hatta Swasono





kali panen, jika dijual hasilnya sekitar Rp 6 juta/ton. Penurunan jumlah panen dan penghasilan petani akibat kekeringan, berdampak lebih besar terhadap buruh tani yang kebanyakan perempuan. Upah mereka hanya Rp. 28 ribu per hari. Jika bekerja selama 25 hari, upah yang diterima Rp. 700 ribu satu kali panen. Padahal itulah sumber pendapatan utama keluarga, selain suami yang berpenghasilan maksimal Rp. 500 ribu setiap bulannya.<sup>17</sup>

Kegagalan panen berlarut-larut akan berkontribusi terhadap memburuknya krisis pangan dan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, yang masih jauh dari pencapaian program *Milenium Development Goal's*. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan 19 provinsi yang mempunyai prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di atas prevalensi nasional sebesar 18,4%<sup>18</sup>.



Di sektor kelautan dan perikanan, setelah dilanda berbagai upaya pengrusakan di wilayah pesisir, perubahan cuaca ekstrim membuat banyak nelayan tidak dapat melaut. Hasil budidaya dan penangkapan ikan menurun. Sebelumnya, jumlah hari mereka melaut adalah 240 - 300 hari setahunnya, kini hanya 160 - 180 hari. Akibatnya pendapatan nelayan tradisional pun berkurang hingga berkisar 50 hingga 70 persen.<sup>19</sup> Artinya, pendapatan keluarga nelayan, berkurang. Dan biasanya, perempuanlah penebus kekurangan itu.

Belum lagi, pada beberapa tempat, tanda-tanda alam yang biasanya digunakan nelayan menentukan musim panen. Kini tak bisa menjadi pemandu lagi. Di pesisir Indramayu, dulunya masyarakat mengetahui pancaroba dari tanda-tanda alam.

Sampai 2003, nelayan masih bisa memperkirakan angin barat dan timur. Musim barat datang ditandai tangkapan Rajungan dan Sotong yang melimpah. Tapi, tiga tahun belakangan, sejak 2005, masyarakat tidak lagi bisa memperkirakan perubahan cuaca tersebut.<sup>20</sup>



“Perubahan cuaca ekstrim membuat banyak nelayan tidak dapat melaut. Hasil budidaya dan penangkapan ikan menurun. Dan biasanya, perempuanlah penebus kekurangan itu”